

The Role Of International Trade During Internal Conflict Myanmar (2021-2025)

Peran Perdagangan Internasional Terhadap Negara Myanmar Yang Mengalami Konflik Internal (2021-2025)

Muhammad Yuga Muhtadi¹, Dwi Fauziansyah Moenardy²

Program Studi Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia^{1,2}

muhammad.yuga@widyatama.ac.id¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The 2021 internal conflict in Myanmar triggered a multidimensional crisis and Western economic sanctions that theoretically had the potential to cripple the country's economy. However, an anomaly occurred in the field where international trade activities actually adapted and continued to operate. This study aims to analyze the role of international trade and Myanmar's adaptation strategies in maintaining its economic activities during the 2021-2025 conflict period. This research uses a descriptive qualitative approach with document study and literature review methods from secondary data sources such as the ITC Trade Map and the World Bank. The results showed that international trade played a crucial role as an economic buffer holding back the country's economic contraction. This adaptation was carried out through two main strategies: shifting the axis of trading partners from Western countries to regional partners asymmetrically (especially China and Thailand), and diverting logistics routes from formal ports to land border routes (cross-border trade). This route transition gave rise to a shadow economy controlled by armed ethnic groups, where extractive commodities were exported and essential needs were imported outside official banking channels. In conclusion, international economic sanctions did not completely kill Myanmar's trade but rather encouraged the decentralization of commercial activities towards informal systems at the border to maintain the pulse of the domestic economy.

Keywords: Internal Conflict, International Trade, Shadow Economy, Economic Sanctions, Myanmar.

ABSTRAK

Konflik internal Myanmar pada tahun 2021 memicu krisis multidimensi dan sanksi ekonomi Barat yang secara teoritis berpotensi melumpuhkan perekonomian negara tersebut. Namun, terdapat anomali di lapangan di mana aktivitas perdagangan internasional justru beradaptasi dan tetap beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perdagangan internasional serta strategi adaptasi negara Myanmar dalam mempertahankan aktivitas ekonominya selama periode konflik 2021-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan kajian literatur dari sumber data sekunder seperti Trade Map ITC dan Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional berperan krusial sebagai penyangga ekonomi (economic buffer) yang menahan laju kontraksi negara. Adaptasi ini dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pergeseran poros mitra dagang dari negara Barat ke mitra regional secara asimetris (terutama Tiongkok dan Thailand), serta pengalihan rute logistik dari pelabuhan formal ke jalur perbatasan darat (cross-border trade). Transisi rute ini memunculkan tatanan ekonomi bayangan (shadow economy) yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok etnis bersenjata, di mana komoditas ekstraktif diekspor dan kebutuhan esensial diimpor di luar jalur perbankan resmi. Kesimpulannya, sanksi ekonomi internasional tidak sepenuhnya mematikan perdagangan Myanmar, melainkan mendorong desentralisasi aktivitas niaga menuju sistem informal di perbatasan demi mempertahankan urat nadi perekonomian domestik.

Kata Kunci: Konflik Internal, Perdagangan Internasional, Ekonomi Bayangan, Sanksi Ekonomi, Myanmar.

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional secara konseptual dan empiris merupakan tulang punggung bagi kelangsungan ekonomi suatu negara dalam era globalisasi yang saling terintegrasi (Watol,

2024). Aktivitas ekspor dan impor tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menstabilkan neraca pembayaran. Dalam kondisi makroekonomi yang ideal, stabilitas politik dan keamanan domestik menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim perdagangan yang efisien.

Namun, fenomena yang terjadi seringkali menunjukkan kompleksitas tinggi ketika suatu negara dihadapkan pada guncangan krisis atau konflik internal. Secara umum, diasumsikan bahwa konflik bersenjata berskala nasional akan secara otomatis melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi dan memutus rantai perdagangan akibat rusaknya infrastruktur dan sanksi ekonomi—sebuah konsep yang dikenal sebagai *development in reverse* (Maher, 2015). Akan tetapi, preseden empiris di berbagai negara konflik seperti Kolombia, Suriah, dan Yaman menunjukkan realitas paradoks: aktivitas perdagangan internasional ternyata tidak sepenuhnya terhenti. Sebaliknya, sistem perdagangan seringkali bermutasi dan beradaptasi untuk menopang urat nadi ekonomi di tengah krisis (Cali & Harake, 2015; Maher, 2015; Watol, 2024).

Pola anomali ini menjadi fenomena nyata di Myanmar pada periode krisis 2021-2025. Pasca pecahnya konflik internal awal tahun 2021, Myanmar terjerumus ke dalam krisis multidimensi. Berbagai negara Barat merespons dengan menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis, pembekuan aset keuangan, dan pembatasan akses jaringan perbankan global. Di tingkat regional, stagnasi implementasi resolusi ASEAN *Five-Point Consensus* (5PC) dan pengaplikasian *National Security Exception* (GATT 1994 Article XXI) secara teoritis seharusnya menyebabkan kontraksi ekstrem atas aktivitas perdagangan internasional Myanmar. Nyatanya, data *International Trade Centre* (ITC) menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor Myanmar tetap stabil dan bahkan mempertahankan volume transaksi miliaran dolar (Trade Map ITC, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua masalah utama: (1) bagaimana peran perdagangan internasional terhadap negara Myanmar yang mengalami konflik internal, dan (2) bagaimana strategi adaptasi negara Myanmar dalam mempertahankan serta meningkatkan aktivitas perdagangan internasionalnya selama periode konflik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan memberikan gambaran empiris komprehensif mengenai fenomena keberlangsungan dan strategi adaptasi sistem perdagangan di tengah instabilitas domestik.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan **Teori Interdependensi Asimetris** yang digagas oleh Robert Keohane & Joseph Nye (1977) sebagai landasan utama. Teori ini menjelaskan hubungan internasional di mana tingkat ketergantungan antarnegara tidak seimbang. Dalam konteks Myanmar, ketika negara tersebut mengalami guncangan sanksi dari blok ekonomi utama (Barat), secara otomatis Myanmar mencari jalur pertahanan hidup dengan merelokasi ketergantungannya kepada negara-negara tetangga yang bersedia memberikan akses pasar, seperti Tiongkok dan Thailand.

Sebagai pendukung, **Teori Ekonomi Konflik** dari Collier & Hoeffler (2013) digunakan untuk mendefinisikan lahirnya tatanan ekonomi bayangan (*shadow economy*) di wilayah dengan instabilitas politik yang parah. Hancurnya kapasitas administratif mendorong faksi-faksi bersenjata untuk mengamankan dan mengeksploitasi jalur logistik komersial. Selain itu, **Teori Keunggulan Komparatif** dari David Ricardo (1817) mempostulatkan bahwa perbedaan mutlak sumber daya alam memaksa Myanmar untuk tetap mengekspor komoditas ekstraktif (seperti gas alam dan batu giok) demi membiayai impor komoditas mendesak (bahan bakar, medis, kebutuhan harian).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena anomali bertahannya aktivitas perdagangan internasional Myanmar

di tengah pusaran konflik internal periode 2021-2025. Objek utama penelitian difokuskan pada aktivitas ekspor-impor, dampak kebijakan sanksi, dan strategi adaptasi rantai pasok perbatasan (*cross-border trade*).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber data sekunder. Data ini meliputi publikasi resmi dari *International Trade Centre* (ITC) melalui Trade Map, laporan ekonomi dari Bank Dunia (*World Bank*), serta literatur empiris pendukung. Tahapan analisis data mengikuti kerangka Miles, Huberman (1992), yang meliputi analisis konten, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi data sekunder untuk mengonfirmasi konsistensi temuan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Peran Perdagangan Internasional sebagai Penyangga Ekonomi

Berdasarkan analisis data, aktivitas ekspor dan impor Myanmar tetap berjalan secara berkesinambungan sepanjang tahun 2021-2024. Total nilai ekspor dunia Myanmar mencapai puncaknya pada USD 17,08 miliar (2022) dan bertahan di kisaran USD 14,92 miliar pada 2024. Pola serupa terlihat pada sisi impor yang sempat mencapai USD 17,40 miliar (2022). Aktivitas ini tidak menunjukkan tren keruntuhan absolut sebagaimana diproyeksikan oleh skenario *development in reverse*.

Tahun	Total Ekspor (Juta USD)	Total Impor (Juta USD)	Total Perdagangan (Juta USD)	PDB Nominal (Juta USD)	Rasio Perdagangan thd PDB (%)
2021	15.153,41	14.326,57	29.479,98	66.350	44,42
2022	17.084,51	17.403,36	34.487,87	62.250	55,40
2023	14.752,99	16.440,46	31.193,46	66.760	46,72
2024	14.923,81	12.452,13	27.375,94	74.070	36,97

Tabel di atas mengindikasikan bahwa rasio total perdagangan internasional terhadap PDB Myanmar berada di rata-rata 45,88% per tahun. Walaupun pertumbuhan PDB riil terkontraksi tajam di angka -12,02% pada 2021 dan diperkirakan masih negatif hingga 2025, perdagangan internasional secara empiris berfungsi sebagai penyangga ekonomi (*economic buffer*) yang menahan laju kejatuhan negara akibat perang, membiayai kebutuhan mendasar, dan memastikan komoditas terus terekstraksi.

Strategi Adaptasi: Pergeseran Poros Kemitraan dan Rute Logistik

Mempertahankan urat nadi perekonomian di tengah boikot komunitas internasional memaksa Myanmar melakukan reorientasi kebijakan yang fundamental. Adaptasi ini bermanifestasi dalam dua strategi utama. Pertama, pergeseran poros mitra dagang (*Asymmetric Interdependence*). Tekanan isolasi internasional mendorong pengalihan fokus dagang secara masif ke Tiongkok dan Thailand. Pada 2024, ekspor ke Tiongkok mencatatkan nilai USD 3,45 miliar dan ke Thailand USD 2,9 miliar, sepenuhnya menggeser pasar Eropa dan Amerika Serikat (Trade Map, 2026).

Kedua, pengalihan rute logistik dan pembentukan ekonomi bayangan. Akibat tingginya risiko pelayaran dan boikot di Pelabuhan Yangon, 80% total perdagangan Myanmar terpusat ke jalur lintas batas darat (*cross-border trade*). Karena hilangnya supremasi hukum, gerbang darat strategis (seperti Muse dan Myawaddy) dikuasai oleh Kelompok-kelompok Etnis Bersenjata (*Ethnic Armed Organizations*). Situasi ini memicu desentralisasi niaga dalam bentuk tatanan ekonomi bayangan berskala transnasional, di mana pencatatan retribusi informal diberlakukan dan instrumen pembayaran dilakukan di luar pengawasan perbankan internasional yang

disanksi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa krisis multidimensi dan sanksi ekonomi Barat sejak tahun 2021 tidak melumpuhkan perdagangan internasional Myanmar secara absolut. Perdagangan internasional terbukti memainkan peran krusial sebagai penyangga perekonomian (*economic buffer*) negara di tengah instabilitas. Myanmar merespons tantangan tersebut melalui dua strategi adaptasi utama: (1) pergeseran poros mitra dagang dari pasar Barat beralih secara asimetris ke negara-negara regional seperti Tiongkok dan Thailand, serta (2) pergeseran rute logistik dari pelabuhan laut formal ke jalur perbatasan darat. Transisi rute ini mendorong munculnya *shadow economy* yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata, memungkinkan komoditas ekstraktif tetap mengalir demi menjaga kelangsungan hidup negara.

Untuk menjaga kelangsungan stabilitas kawasan, lembaga regional khususnya ASEAN perlu merumuskan kerangka diplomasi ekonomi dan kemanusiaan yang komprehensif (*constructive engagement*) agar pengucilan Myanmar tidak berimbas pada kelumpuhan rantai pasok regional. Bagi pemangku kebijakan serta pelaku usaha regional, fenomena ekonomi bayangan dan *cross-border trade* di perbatasan Myanmar harus menjadi acuan dalam merumuskan manajemen risiko (*risk mitigation*) rantai pasok di zona konflik.

Daftar Pustaka

- Asfar, I. T. (2019). Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). *Journal Equilibrium*, 5(127), 14-18.
- Assem, H. (2023). Trade and Civil Conflicts. World Bank Policy Research.
- Cali, M., & Harake, W. (2015). The Impact of the Syrian Conflict on Lebanese Trade. World Bank Group.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2013). Greed and Grievance in Civil War. Oxford University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. Little, Brown.
- Maher, D. (2015). Rooted in Violence: Civil War, International Trade and the Expansion of Palm Oil in Colombia. *New Political Economy*, 20(2), 299-330.
- Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray.
- Watol, B. S. (2024). The Post-2011 Yemen Internationalized Civil War: It's National, Regional and Global Implications. *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(4), 3-25.